

**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA SAMARINDA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Muhammad Farisah Adani

NPP. 32.0787

Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: Farisahadani11@gmail.com

Dosen Pembimbing: Uliana Ria Sembiring, S.Pd, M.Si.

ABSTRACT

Background: : The high frequency of flooding in Samarinda City due to decreased water absorption capacity and weak structural and non-structural mitigation requires BPBD to implement more effective and adaptive strategies to local conditions. **Purpose:** This study aims to analyze the strategy of the Regional Disaster Management Agency in flood disaster mitigation in Samarinda City. **Methods:** This study uses Kooten's theory with four strategy indicators: organization, program, resources, and institutions, and is implemented with a descriptive qualitative approach. **Results:** (1) Organizational strategy has prioritized risk prevention and education; (2) Program strategy includes the establishment of evacuation points and KALTANA training; (3) Resource strategy includes training of the Rapid Reaction Team and emergency response logistics; (4) Institutional strategy includes cross-sector coordination and urban forest conservation. **Conclusion:** The strategy implemented is quite effective, but still requires increased institutional capacity and budget optimization and community participation.

Keywords: Flood, Mitigastion, Strategy

ABSTRAK

Latar Belakang: Tingginya frekuensi banjir di Kota Samarinda akibat menurunnya daya resap air dan lemahnya mitigasi struktural maupun non-struktural menuntut BPBD untuk menerapkan strategi yang lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi local. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Samarinda. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Kooten dengan empat indikator strategi: organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan, dan dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. **Hasil:** (1) Strategi organisasi telah mengutamakan pencegahan dan edukasi risiko; (2) Strategi program mencakup pembentukan titik evakuasi dan pelatihan KALTANA; (3) Strategi sumber daya mencakup pelatihan Tim Reaksi Cepat dan logistik tanggap darurat; (4) Strategi kelembagaan mencakup koordinasi lintas sektor dan konservasi hutan kota. **Kesimpulan:** Strategi yang diterapkan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi anggaran serta partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Banjir, Mitigasi, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan wilayah kepulauan terluas di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia, serta berbatasan dengan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis dan demografis yang berbeda-beda membuat Indonesia sebagai zona teritorial yang sangat rentan terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana nonalam. Bencana alam yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam dan bukan alam, serta faktor manusia, dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis (BNPB: 2012).

Masyarakat menilai jika tinggal di perkotaan lebih mampu memberikan suatu fasilitas dan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup setiap harinya. Urbanisasi yang berjalan terus terjadi baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan oleh masyarakat. Dalam 20 tahun terakhir banyak kota di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat yang diikuti dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan masalah lingkungan yang setiap hari akan menjadi lebih parah yang mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini menyebabkan perkotaan menjadi padat serta kebutuhan masyarakat pun ikut meningkat. Salah satu kebutuhan masyarakat yaitu mengenai kebutuhan tempat tinggal. Dalam membangun tempat tinggal ini tentunya masyarakat membutuhkan lahan. Dengan kata lain perubahan penggunaan lahan terjadi sangat signifikan. Dampak dari penggunaan lahan yang tidak tepat menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana yaitu bencana banjir. Bencana banjir yang melanda perkotaan menjadi persoalan yang tidak ada habisnya bagi pemerintah maupun masyarakat yang ada.

Meningkatnya masalah banjir yang ada di perkotaan ini terjadi karena kurangnya perhatian terhadap suatu kelestarian lingkungan dan lebih mementingkan kepada pembangunan yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Penataan ruang dan bencana banjir merupakan dua hal yang saling berkaitan sangat erat, apabila penataan ruang dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan meminimalisir terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu dalam penataan ruang juga harus memperhatikan pengelolaan air yang baik sehingga air yang ada tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan bagi kehidupan Masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik, Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 718 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 827.994 jiwa yang tersebar di sepuluh kecamatan. Terdapat beberapa sungai yang melintas di Kota Samarinda dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Kota Samarinda dalam berbagai kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman.

Tidak hanya karena musim hujan, banjir terus melanda Kota Samarinda karena pertumbuhannya yang cepat, tetapi juga karena banyaknya aktivitas pertambangan dan pembangunan yang telah mengurangi daerah resapan air di Kota Samarinda, biasanya terdapat sungai yang meluap yang merupakan kiriman dari wilayah lain sehingga masih terkena dampaknya.

Proses membantu pengurangan risiko bencana maka peran dari pemerintah di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yaitu melalui amanat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang terdapat melalui pasal 5 hingga pasal 8 dengan mengimplementasikan bahwa tugas dan wewenang pengurangan dari risiko terjadinya bencana pada daerah terkait merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang mana mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengurangan risiko bencana sampai dengan penyuluhan tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan terjadinya bencana alam kepada masyarakat dan mengajak pihak swasta lain

untuk berpartisipasi dalam menekan angka risiko kerugian dari terjadinya bencana banjir di masa depan.

Untuk menangani banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda telah menggunakan kegiatan MONEV (monitoring evaluasi), yang merupakan kegiatan pemantauan bencana banjir. Tugas MONEV adalah untuk memantau dan menilai banjir setiap tahun untuk mengantisipasi banjir di daerah yang rentan terhadap banjir saat musim penghujan tiba. BPBD juga mengajak masyarakat di daerah rawan banjir untuk selalu waspada dan terus menjaga lingkungan dengan baik. Masalah banjir yang disebabkan oleh cuaca ekstrem serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi untuk menghadapi potensi bencana banjir yang akan terjadi di daerahnya. Dibutuhkan suatu strategi dalam menyelesaikan faktor – faktor yang menjadi penyebab bencana banjir, oleh karena itu BPBD harus melakukan suatu strategi agar dapat meningkatkan baik dalam strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya dan strategi kelembagaan dalam menghadapi bencana banjir dan menjadi trigger kepada masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi pada kejadian bencana banjir yang terjadi sebelumnya.

1.2. Kesenjangan Masalah

Kesenjangan masalah terletak pada bagaimana penanganan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi bencana banjir yang ada di Kota Samarinda tidak hanya karena musim hujan, banjir terus melanda Kota Samarinda karena pertumbuhannya yang cepat, tetapi juga karena banyaknya aktivitas pertambangan dan pembangunan yang telah mengurangi daerah resapan air di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda banjir merupakan masalah yang cukup serius ini dilihat dari pusat pengendalian bencana di Kota Samarinda pada tahun 2019-2023 kemarin bencana banjir merupakan salah satu yang tertinggi, Meskipun data bencana tanah longsor menjadi salah satu yang tertinggi di Kota Samarinda, dalam pelaksanaan penanganan bencana banjir di kota Samarinda masih belum dikatakan cepat dan responsif hal ini didukung dengan data masih sering terjadinya bencana banjir di beberapa tahun belakang di setiap kecamatan di Kota Samarinda.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dari berbagai aspek yaitu objek penelitian, teori, serta metode penelitian yang digunakan. Penelitian pertama oleh Furqon Hasani (2015) yang berjudul “Peran BPBD Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam” menjelaskan bahwa Rumusan strategi penanganan berbasis mitigasi bencana dihasilkan dari mitigasi struktur (fisik) – mitigasi non struktur (non fisik) yang berfungsi untuk mengurangi nilai kelas risiko. Penelitian kedua oleh Indra Saputra (2020) “ Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020” menjelaskan bahwa BPBD Pandeglang masih belum optimal. Masalah utamanya adalah koordinasi yang lemah antara BPBD dengan lembaga dan organisasi lain saat terjadi bencana, sehingga memperlambat respon dan efektivitas penanggulangan. Penelitian ketiga oleh Sultan Maulana Awaluddinsyah (2022) “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo Dalam Mitigasi Bencana Banjir” menjelaskan bahwa penguatan internal dan edukasi masyarakat sangat penting dalam strategi mitigasi bencana banjir. Penelitian keempat Nasyiruddin, Muhammadiyah, dan Muhammad Yusuf badjido (2015) “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng(2015)” menjelaskan bahwa sebagian besar strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantaeng sudah terlaksana dengan baik seperti pada pembuatan waduk dan penghijauan tetapi pada kesadaran masyarakat dalam Penanggulangan banjir masih tergolong

kurang, terlihat dari faktor banyaknya sampah pada tempat saluran air. Penelitian kelima dari Ayu Sekar Ningrum yang berjudul “Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa” menjelaskan bahwa Strategi penanganan banjir dengan mitigasi bencana di kawasan rawan banjir di Kota Langsa terbagi menjadi dua, yakni: (1) Mitigasi struktural berupa penjelasan tentang pembuatan bangunan pengendali banjir ; (2) Mitigasi non struktural berupa pelatihan mitigasi bencana, serta evaluasi kebijakan pengurangan risiko banjir pada kawasan rawan banjir di Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Penelitian keenam dari Yenny Nur Amalia (2018), “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Tanggap Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik” menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam membangun partisipasi masyarakat tanggap bencana banjir adalah dengan memberdayakan masyarakat secara mandiri untuk tanggap bencana di daerah yang berpotensi mengalami bencana banjir. Dalam memberdayakan masyarakat tersebut BPBD melakukan tindakan - tindakan yang berisi program serta kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk bisa tanggap bencana. Penelitian ketujuh dari Sukarno, Rike Rismawati Mangende., Alex Binilang. (2016). “Perencanaan Saluran Penanggulangan Banjir Muara Sungai Tilamuta” menjelaskan bahwa pengendalian banjir yang dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Kabupaten Boalemo pada sungai tilamuta belum dapat menampung debit air maksimum sehingga diperlukannya saluran yang dapat menampung dan mengalirkan debit banjir. Penelitian Kedelapan dari Arisanti, Fitriadi, & Kumalawati. (2017). “Tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tanah longsor di desa jaro kecamatan jaro kabupaten tabalong” kesiapsiagaan masyarakat di Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong bisa dikatakan sudah siap, hal ini dapat dilihat dari program yang dilaksanakan oleh masyarakat tentang program kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tanah longsor di Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Penelitian Kesembilan dari Siti Safiyah Babay dan Aristotulus E.Tungka (2016). “Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” menjelaskan bahwa penanggulangan mitigasi bencana banjir mulai dari tindakan sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sehingga masyarakat dapat meminimalisir dampak bencana banjir. Bentuk partisipasi tersebut sudah diimplementasikan dan efektif di dalam masyarakat ketika bencana banjir akan datang. Penelitian Kesepuluh dari Ananda Urbanus dan Rieneke Lusia Evani Sela. “Mitigasi Bencana Banjir Struktural Dan Non-Struktural Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan” menjelaskan bahwa mitigasi bencana yang dilakukan menyesuaikan dengan tingkat risiko dari bencana dimana desa dengan risiko bencana banjir tinggi yaitu direkomendasikan membuat rencana tentang pembangunan fisik (struktural) dalam upaya mengurangi bahaya dari banjir, kemudian desa dengan risiko bencana banjir sedang yaitu direkomendasikan untuk penambahan maupun perbaikan mengenai bentuk fisik (struktural) pengendalian banjir yang telah ada maupun belum ada, dan daerah dengan risiko bencana banjir rendah yaitu direkomendasikan untuk perbaikan mengenai bentuk fisik (struktural) pengendalian banjir yang telah ada, namun belum maksimal dalam sistem pelaksanaannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Sebagai wujud kebaruan ilmiah, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian Awaluddinsyah (2022) yang menitikberatkan pada edukasi masyarakat, penelitian ini lebih fokus pada strategi kelembagaan dan program mitigasi struktural dan non-struktural di Kota Samarinda. Kebaruan juga terletak pada integrasi teori Kooten dalam praktik mitigasi lokal. Penelitian ini berfokus pada konteks yang spesifik, yaitu bagaimana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dalam Mitigasi Bencana Banjir dan

upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi banjir melalui kegiatan mitigasi, adaptasi dan inovasi dari berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Samarinda.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mampu menggali secara mendalam makna, strategi, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Pemilihan informan didasarkan pada peran dan keterlibatan langsung dalam kebijakan dan pelaksanaan mitigasi banjir. Informan kunci adalah Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Samarinda karena memiliki wewenang langsung dalam penyusunan strategi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025 selama dua minggu, berlokasi di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

3.1.1 Strategi Organisasi

Strategi organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda menitikberatkan pada upaya pencegahan bencana, dengan mengevaluasi serta memperkuat upaya mitigasi baik secara struktural maupun non-struktural untuk mengurangi risiko banjir. Dalam konteks pengurangan risiko banjir, strategi organisasi memiliki implikasi penting bagi masa depan untuk meningkatkan efektivitas, serta menfokuskan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda. Grand Strategy dalam mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda adalah mengutamakan kegiatan pencegahan banjir, yang secara otomatis akan meningkatkan pengurangan risiko banjir. Dapat dipahami bahwa mitigasi terhadap risiko banjir di Kota Samarinda tidak hanya sekadar menjadi strategi utama, melainkan juga menjadi landasan kebijakan yang diutamakan dalam upaya melindungi warga dan infrastruktur kota dari ancaman banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda telah menetapkan pendekatan terintegrasi dengan melaksanakan berbagai metode mitigasi, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural. Pada mitigasi struktural, upaya utama dilakukan melalui perbaikan fisik seperti pembangunan tanggul, peningkatan sistem drainase, dan pengelolaan sungai yang lebih efektif. Sementara itu, dalam aspek non-struktural, fokus diberikan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko banjir melalui kampanye edukasi, penyediaan sistem informasi yang mudah diakses, serta pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Penting untuk dicatat bahwa adaptasi strategi terhadap perubahan kondisi lapangan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan upaya mitigasi, mengingat dinamika lingkungan dan masyarakat yang terus berkembang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda juga senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan yang responsif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan dan keamanan bersama.

3.1.2 Strategi Program

Dalam rangka mengurangi risiko banjir di Kota Samarinda, dibentuklah sebuah program yang didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu preventif, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Program tersebut merupakan bagian integral dari kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam mitigasi risiko bencana banjir. Pentingnya pelaksanaan program ini dengan tepat dan efisien menuntut adanya kesesuaian dengan aspek teknis yang telah ditetapkan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, untuk memastikan efektivitas program, diperlukan pula penetapan prosedur kerja yang jelas dan terstruktur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda telah menjalankan serangkaian program untuk mengurangi risiko banjir. Program-program tersebut dirancang dengan tujuan khusus dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Salah satu program adalah pembentukan titik evakuasi di setiap kelurahan di Kota Samarinda, yang bertujuan untuk memudahkan mobilitas masyarakat saat evakuasi dalam keadaan darurat. Selanjutnya, terdapat program pembaharuan infrastruktur kebencanaan, terutama dalam perencanaan dan pembangunan ulang sistem saluran drainase kota. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan ketahanan infrastruktur kota terhadap risiko banjir. Program lainnya melibatkan pembinaan Tim Reaksi Cepat, yang terdiri dari relawan masyarakat yang telah dilatih, yang dikenal sebagai Kelurahan Tanggap Bencana (KALTANA). Tim ini bertugas memberikan respons cepat dalam mengurangi dampak bencana banjir di tingkat lokal. Terakhir, terdapat program sosialisasi tentang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk membentuk kesadaran dan sikap tangguh masyarakat dalam menghadapi bencana di Kota Samarinda. Dengan menjalankan berbagai program tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat serta infrastruktur kota terhadap risiko banjir.

3.1.3 Strategi Sumber Daya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda giat menggelar program pelatihan serta menjalin kemitraan dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya menyosialisasikan strategi mitigasi bencana banjir. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menghadapi risiko banjir. Di samping itu, lembaga tersebut juga mengadakan pelatihan bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan memberikan bantuan sosial bersama TRC ketika terjadi banjir. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa anggota TRC dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi keadaan darurat serta memonitor perkembangan situasi bencana secara langsung. Melalui kolaborasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda berusaha secara aktif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan tim penanggulangan bencana dalam mengantisipasi ancaman banjir. Ketersediaan sumber daya adalah pijakan utama yang menopang kelancaran aktivitas suatu organisasi. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek, seperti tenaga manusia, alam, teknologi, modal, dan faktor lainnya yang relevan, meskipun beberapa mungkin memiliki dominasi yang lebih kuat daripada yang lain. Manajemen yang efektif memegang peranan krusial dalam optimalisasi penggunaan sumber daya organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan, serta memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

3.1.4 Strategi Kelembagaan

Dalam rangka menanggulangi risiko bencana banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda menerapkan strategi kelembagaan yang melibatkan langkah-langkah seperti berkoordinasi dengan institusi lain dan menjaga keseimbangan ekologi. Lebih lanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda juga menerapkan strategi kelembagaan yang

terfokus pada penanganan bencana banjir, dengan mengambil langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan konteks lingkungan di Kota Samarinda, melakukan koordinasi antara lembaga di berbagai wilayah kabupaten dan kota, serta mengupayakan pengurangan risiko bencana banjir melalui pelestarian ekologi guna mencegah terjadinya bencana banjir. Strategi kelembagaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda adalah dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi kondisi lingkungan Kota Samarinda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda telah mengembangkan strategi kelembagaan yang mengambil manfaat dari karakteristik unik lingkungan Kota Samarinda, yang dikenal sebagai kota dengan tiga wajah perkotaan, untuk melakukan mitigasi terhadap risiko bencana banjir. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah melalui koordinasi sejumlah relawan yang telah mendapat pelatihan, seperti kelompok masyarakat Kelurahan Tanggap Bencana (KALTANA), untuk bertindak dalam situasi darurat saat terjadi banjir. Tujuannya adalah untuk memperluas cakupan penanganan bencana dengan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah yang terkena dampak. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda juga mengoptimalkan pemanfaatan kawasan perkotaan yang berbatasan dengan hutan sebagai upaya penyerapan air akibat banjir. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan penanaman dan peningkatan jumlah pepohonan di berbagai bagian Kota Samarinda. Dengan demikian, diharapkan bahwa vegetasi hutan kota dapat berperan sebagai resapan alami yang mampu menyerap sebagian besar air yang berlebihan saat terjadi banjir, sehingga membantu mengurangi dampak yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap strategi kelembagaan yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, ditemukan beberapa aspek unik dalam upaya mitigasi bencana banjir. Keistimewaan tersebut terletak pada pendekatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengurangi risiko bencana banjir, yang berasal dari inisiatif internal badan tersebut. Pendekatan ini memperhatikan dengan seksama serta memanfaatkan kondisi lingkungan yang khas di Kota Samarinda. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda juga mengambil langkah yang inovatif dengan memanfaatkan hutan kota yang ada sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana banjir, tanpa mengorbankan kelestarian ekologi yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang diambil oleh lembaga ini tidak hanya efektif dalam mengurangi risiko bencana banjir, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. Kepedulian sosial dari warga Kota Samarinda juga merupakan faktor pendukung dari strategi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda karena dengan adanya kepedulian dari masyarakat maka akan menciptakan konsep pentahelix penanggulangan bencana banjir. Bantuan dari kegiatan kemanusiaan juga hadir oleh masyarakat Kota Samarinda dari inisiatif dan antusiasnya masyarakat kota Samarinda yang tidak terdampak dengan memberikan seperti bantuan – bantuan logistik bahan makanan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat yang terdampak, otomatis akan membantu pemerintah dalam melakukan pengurangan risiko terhadap banjir yang terjadi.

3.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan dari hasil observasi dalam mengenai faktor penghambat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dalam mitigasi bencana banjir yaitu kelembagaan yang kurang bagus pastinya akan memberikan berpengaruh terhadap pencapaian suatu tujuan dari lembaga itu sendiri dikarenakan akan muncul kelemahan dari sumber daya manusia serta sarana prasarannya yang kurang memumpuni. Hal tersebut membuat strategi dari mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda akan susah dilaksanakan serta untuk mencapai hasil yang maksimal dalam nilai yang diharapkan.

3.3 Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan, Kesiapsiagaan dan Kekuatan Daerah Untuk Menghadapi Banjir

Berdasarkan dari hasil observasi penulis mengetahui bahwa dalam meningkatkan kualitas dari ketahanan, kesiapsiagaan dan kekuatan yang dimiliki daerah Kota Samarinda dalam menghadapi bencana banjir maka hal yang harus diutamakan adalah mengurangi pengaruh serta dampak yang ditimbulkan oleh kebencanaan tersebut dan memperbaiki koordinasi dari kelembagaan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Inovasi merupakan suatu proses atau hasil dari penciptaan sesuatu yang baru atau perubahan yang signifikan dalam cara – cara berpikir, bekerja atau menghasilkan suatu barang atau layanan yang meliputi pengembangan ide – ide baru, penemuan solusi dalam penyelesaian suatu masalah. Inovasi bencana ini terbagi menjadi 3 (tiga) indikator yaitu regulasi, teknologi, informasi dan komunikasi serta manajemen bencana. Pemerintah Kota Samarinda melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan ketahanan menghadapi bencana banjir melalui 3 perangkat daerah yaitu BPBD, PUPR dan DLH. Pihak BPBD Kota Samarinda melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir seperti penerbitan dokumen kajian resiko bencana 5 tahun kedepan yang bertujuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi bencana serta dampaknya terhadap manusia. Kemudian, implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan berbagai program kebencanaan . Akan tetapi, dalam proses manajemen yang dilakukan masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan alat peringatan dini yang belum maksimal di semua titik. Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Dinas PUPR didasari oleh Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana banjir yang terjadi. Kemudian, Pengembangan Smart Water Management (SMW) yang bertujuan untuk mengukur kuantitas dan kualitas penggunaan air, pemantauan keamanan infrastruktur sumber daya air dan penanganan resiko bencana yang berkaitan dengan air. Dinas PUPR juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu tertentu pada saluran drainase dan daerah aliran sungai. Pelaksanaan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Samarinda. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda selalu melakukan monitoring terhadap penanganan sampah pada daerah – daerah rawan banjir. Pelaksanaannya mencakup pemantauan tingkat kebersihan saluran air, sistem drainase dan titik – titik rawan penumpukan sampah yang dapat menyebabkan penyumbatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di lapangan, Program bencana banjir yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Samarinda dinilai sudah efektif dan masyarakat telah mandiri dalam menghadapi bencana, menciptakan masyarakat yang siaga. Peran aktif tidak hanya dari BPBD Kota Samarinda tetapi juga dari pihak Kelurahan, dan tim relawan mendukung keberhasilan program ini. Namun, beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, budaya lokal yang kurang waspada terhadap bencana, dan sarana prasarana yang masih harus dilengkapi dan dibiayai untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi kedepannya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan manajemen anggaran yang efisien, peningkatan kesadaran

masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan, serta perubahan budaya lokal agar masyarakat lebih waspada terhadap bencana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan jarak penelitian, waktu penelitian hanya berlangsung selama 2 minggu disamping keluasan waktu informan yang sedikit dan lokasi pengambilan data yang terbatas. Beberapa pihak enggan untuk diwawancarai dengan lengkap dan penelitian dilakukan hanya di satu kelurahan saja yang ditelaah sehingga dapat menghasilkan jawaban yang diinginkan.

Arah Masa Depan Penelitian (Future work). . Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam resiliensi pengurangan resiko bencana banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama penulis tujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan izin, memfasilitasi, serta menyediakan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada dosen pembimbing, Uliana Ria Sembiring, S.Pd., M.Si. atas segenap bimbingan dan arahnya selama penelitian ini dilakukan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah bersedia menjadi narasumber atas waktu, informasi, dan wawasan berharga yang telah dibagikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ndraha, Taliziduhu. 1997 Metodologi Ilmu Pemerintahan di Indonesia, Jakarta:Bina Aksara.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Nugroho, S. S., Hilman Syahrial Haq, S. H., & Yulias Erwin, S. H. (n.d.). *Hukum Mitigasi Bencana di Indonesia*. Penerbit Lakeisha.

Nurjanah, D., Kuswanda, D., & Siswanto, A. (2012). *Manajemen Bencana*. Alfabeta.

Pribadi, K. (2008). *Buku Pegangan Guru Pendidikan Siaga Bencana*. Bandung : Pusat Mitigasi Bencana ITB.

Rahayu. Dkk. (2009). *Banjir dan Upaya Penanggulangannya*. Pusat Mitigasi Bencana

Ramli S. (2010). Pedoman praktis manajemen bencana (disaster management). Gadjah Mada Press.

Rangkuti F. (1998). Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis. Gramedia Pustaka

Utama

Rufaidah, P. (2013). Manajemen strategik. Humaniora.

Salusu J. (2006). Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo.

Silalahi. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supomo, & Indriantoro. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Suradinata E. (2013). Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan. Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: RefikaAditama

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : RinekaCipta.

Triton PB. (2011). Manajemen strategis : terapan perusahaan dan bisnis. Oryza.

Wijayanto D. (2012). Pengantar Manajemen. Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL

Abbas, Amjath-Babu, Kachele, Usman & Muller, K. 2016. *An overview of flood mitigation strategy and research support in South Asia : implications for sustainable flood risk management. International Journal of sustainable Development & World Ecology*

Aulia, Dwi Nur Ilma. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros." Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar (2019).

Awaluddinnsyah, S. (2022). Strategi Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Gorontalo Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Babay, Siti S., Aristotulus E. Tungka, and Ingerid L. Moniaga. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA COMMUNITY PARTICIPATION IN FLOOD DISASTER MITIGATION IN NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY." *Fraktal: Jurnal Arsitektur, Kota dan Sains* 6.2 (2021).

- Badjido, M. Y. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 157–173.
- Pramesti, S. J., Handoko, R., & Widodo, J. (2020).
- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2007). *Editorial: Debating Social Protection*. *Debating Social Protection*, 38(3), 1–7.
- Eato, Sri Dian Kristi Handayani, Michael M. Rengkung, and Johannes Van Rate. "Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." *Spasial* 4.3 (2017): 108-120.
- Furqon Hasani. (2015). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dalam Mitigasi Bencana Alam pada Masyarakat Kabupaten Bantul. UIN Sunan Kalijaga.
- Gunanda, A., & Koestoer, R. H. S. (2023). *Evaluation of Flood Disaster Management Planning: A Comparative Method for Botswana and Indonesia*. *ASEAN Natural Disaster Mitigation and Education Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/andmej.v1i1.2023.134>
- Hetharia, J. S., & Polyando, P. (2024). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Ambon, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Indra Saputra. (2020). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Universitas Brawijaya.
- Nasyiruddin, N., Muhammadih, M., & Badjido, M. Y. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 157–173
- Ningrum, Ayu Sekar, and Kronika Br Ginting. "Strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa." *GEOSEE* 1.1 (2020).
- Samosir, R., Mujahidin, & Murdhani, L. A. (2023). *Regional Disaster Management Agency Strategy in Flood Disaster Mitigation in Bontang City, East Kalimantan Province*. *International Journal of Scientific Research*. <https://doi.org/10.62894/q8k4yy22>
- Urbanus, Ananda, Rieneke LE Sela, and Aristotulus E. Tungka. "Mitigasi bencana banjir struktural dan non-struktural di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *Spasial* 8.3 (2021): 447-458
- Yazid, A. S., Adnan, T.F.F.T., Abdullah, A., Daud, W.N, Salleh, F., & Husin, M.R. 2017. *Flood Risk Mitigation: Pressing Issues and Challenges*. *International Review Of Management and Marketing*, 7(1), 157-163.

C. PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23. (2014). Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24. (2007). Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21. (2008). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46. (2008). Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10. (2017). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 99. (2021). Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

D. WEBSITE

<https://kaltim.antaranews.com/amp/berita/203766/10-lokasi-di-samarinda-terendam-banjir-setelah-hujan-lebat> diakses pada 5 Oktober 2024

<https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA3IzI=/jumlah-desa-kelurahan-yang-mengalami-bencana-alam-banjir-menurut-kecamatan-di-kota-samarinda.html> diakses
pada 5 Oktober 2024

[https://kaltimtoday.co/tim-teknis-bpbd-samarinda-bahas-hasil-monev-terkait-banjir-tahunan/BPBD Kota Samarinda Melakukan Monev Terkait Banjir Tahunan](https://kaltimtoday.co/tim-teknis-bpbd-samarinda-bahas-hasil-monev-terkait-banjir-tahunan/BPBD-Kota-Samarinda-Melakukan-Monev-Terkait-Banjir-Tahunan) diakses pada 5 Oktober
2024